



**PRAKTIK KORUPSI DAN DEGRADASI KUALITAS
DEMOKRASI DI INDONESIA (ANALISIS DARI PERSPEKTIF
BANALITAS KEJAHATAN HANNAH ARENDT)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

KAPRISIUS EDWIN SELAI

NPM: 20.75.6844

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2024

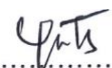


LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Kaprisius Edwin Selai
2. NPM : 20.75.6844
3. Judul : Praktik Korupsi dan Degradasi Kualitas Demokrasi di Indonesia
(Analisis dari Perspektif Banalitas Kejahatan Hannah Arendt)

+

4. Pembimbing

1. Dr. Yosef Keladu
(Penanggungjawab)
2. Dr. Bernardus Subang Hayong
3. Dr. Philipus Ola Daen


:

:

:

5. Tanggal diterima : 10 Mei 2023

6. Mengesahkan
Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui
Rektor IFTK Ledalero




Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada
21 Mei 2024
Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Yosef Keladu
(Penanggungjawab)
2. Dr. Bernardus Subang Hayong
3. Dr. Philipus Ola Daen

Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the list of examiners. Each signature is placed above a horizontal dotted line, indicating the signature of the corresponding member of the exam board.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaprisius Edwin Selai

NPM : 20.75.6844

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 21 Mei 2024

Yang menyatakan



Kaprisius Edwin Selai

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaprisius Edwin Selai

NPM : 20.75.684

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty – Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Praktik Korupsi dan Degradasi Kualitas Demokrasi di Indonesia (Analisis dari Perspektif Banalitas Kejahatan Hannah Arendt)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 21 Mei 2024

Yang menyatakan



Kaprisius Edwin Selai

KATA PENGANTAR

Praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik menjadi salah satu tantangan yang amat serius dalam praksis berdemokrasi di Indonesia. Sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi, perkara korupsi selalu menghantui proses penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan dengan skala, kompleksitas, ataupun luas cakupan yang bervariasi. Ekses paling serius dari praktik korupsi ini tentu saja dirasakan oleh rakyat yang tidak berdaya secara ekonomi, sosial, dan politik. Sebab, idealisme kesejahteraan umum (*bonum commune*) yang ditawarkan oleh Demokrasi Pancasila dicaplok oleh para pejabat publik yang bejat, rakus dan korup. Sementara itu, rakyat akar rumput yang membutuhkan sentuhan pemberdayaan justru menikmati ampas dari perilaku para pejabat publik yang korup tersebut.

Potret buram demokrasi di atas tentu memantik kegelisahan publik di tengah upaya menciptakan reformasi politik dan demokratisasi. Tidak sedikit publik Indonesia yang mulai menaruh pesimisme terhadap demokrasi lantaran integritas para pejabat publik yang bobrok. Kepentingan bersama dikebiri demi memuluskan kepentingan pribadi. Kondisi ini tentu saja menodai sakralitas demokrasi. Demokrasi tidak lagi tampil sebagai sistem politik yang menjanjikan, tetapi menjelma menjadi sistem politik yang elitis, diskriminatif, dan tidak ramah terhadap situasi riil yang dialami oleh masyarakat akar rumput.

Kenyataan di atas tentu saja mengiris jiwa nasionalisme penulis. Betapa tidak, negara yang dahulu direbut dari kerangkeng kolonialisme dengan pertumpahan darah kini berubah menjadi negara yang korup dan anti demokrasi. Persis, kontemplasi atas realitas miris inilah yang mendorong penulis untuk membedah persoalan ini dalam skripsi berjudul: **Praktik Korupsi dan Degradasi Kualitas Demokrasi di Indonesia (Analisis dari Perspektif Banalitas Kejahatan Hannah Arendt)**. Penulis sengaja mengadopsi konsep banalitas kejahatan sebagai pisau analisis, karena refleksi Arendt atas sosok Adolf Eichmann, seorang penjahat Nazi yang tidak mampu berpikir kritis dan berimajinasi, sangat sinkron apabila ditautkan dengan perkara korupsi di Indonesia. Bahwasannya, sebagaimana Adolf Eichmann, penulis melihat dan mencermati salah satu akar

persoalan korupsi di Indonesia adalah ketidakmampuan berpikir dan berimajinasi para pejabat publik ketika dikonfrontasikan dengan sistem, tradisi, atau pun perintah atasan untuk bertindak korup. Dalam hal ini, para pejabat publik kerap terjebak di dalam sistem yang korup atau pun terjebak di dalam sikap ketaatan buta terhadap perintah atasan. Konsekuensinya, kejahatan korupsi tidak lagi dianggap sebagai skandal atas nilai-nilai luhur demokrasi, tetapi dianggap sebagai perbuatan yang biasa dan wajar. Oleh karena itu, berhadapan dengan situasi seperti ini, penulis memproposalkan gagasan Arendt tentang pentingnya mereaktifkan aktivitas berpikir. Dengan berpikir kritis, para pejabat publik mampu mempertanyakan tindakannya, mengambil jarak dari tindakan korupsi, serta tidak terjerembab di dalam lumpur korupsi.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan banyak pihak. Karena itu, dari hati yang paling dalam, penulis ingin berterima kasih kepada beberapa pihak tersebut. *Pertama*, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal, karena telah menuntun dan memberkati penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. *Kedua*, penulis melayangkan ucapan terima kasih kepada Dr. Yosef Keladu yang telah setia berdiskusi, membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi skripsi ini di tengah kesibukan beliau sebagai dosen. Tanpa bantuan beliau, skripsi ini tidak akan selesai. *Ketiga*, penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Bernard Subang Hayong yang telah berkenan membaca dan menguji skripsi ini di tengah kesibukan beliau sebagai dosen. *Keempat*, penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang telah menjadi rahim intelektual yang luar biasa selama kurang lebih empat tahun. Penulis belajar bahwa filsafat bukan sesuatu yang abstrak. Filsafat membentuk cara berpikir kritis, praktis, dan visioner. *Kelima*, penulis juga mengalamatkan ucapan terima kasih kepada Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang matang dan dewasa, terutama dari segi kepribadian, selama kurang lebih lima tahun. *Keenam*, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, cinta, serta dukungan yang luar biasa dari anggota keluarga saya: Bapak Siprianus Selai (Alm.), Mama Anna Nganul, Kakak Harti Selai, Kakak Yonas Selai, dan juga Kakak Yanto Selai. Cinta yang mereka alirkan sungguh-sungguh menguatkan

penulis dalam ziarah intelektual dan pembinaan calon imam. *Ketujuh*, penulis melayangkan ucapan terima kasih kepada teman-teman DIOR 64: Venan, Patrik, Fino, Nofri, Rival, Ebby, Sasly, Yogi, Thino, Okan, Riski, Naldo, Faris, Joi, Yoan, Sera, Tomi; teman-teman Ritapiret 64 dan Sanpio 58, yang telah menguatkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga persaudaraan kita senantiasa terawat hingga selamanya.

Akhirulkalim, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan kritikan, masukan, dan saran dari para pembaca sekalian demi memperdalam serentak memperkaya gagasan dalam skripsi ini.

Ritapiret, Mei 2024



Penulis

ABSTRAK

Kaprisius Edwin Selai, 20.75.6844. **Praktik Korupsi dan Degradasi Kualitas Demokrasi di Indonesia (Analisis dari Perspektif Banalitas Kejahatan Hannah Arendt)**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2024.

Skripsi ini bertujuan untuk (1) mengkaji relasi antara praktik korupsi para pejabat publik dengan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia, (2) membaca praktik korupsi dan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia dalam terang konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt, (3) memproposalkan aktivitas berpikir sebagai jalan membasmi korupsi dan memulihkan marwah demokrasi di Indonesia.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Artinya, penulis membaca serta merefleksikan beragam literatur yang berkenaan dengan topik yang dibahas, baik dalam bentuk buku, jurnal, koran, atau pun sumber-sumber elektronik. Pembacaan sekaligus refleksi atas beragam literatur ini membantu penulis dalam membedah problem korupsi para pejabat publik dan degradasi kualitas demokrasi di Indonesia seturut konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt.

Secara garis besar, skripsi ini berbicara tentang fakta korupsi para pejabat publik di Indonesia yang berimbas pada degradasinya kualitas demokrasi (baca: Demokrasi Pancasila). Mandat yang dipercayakan oleh rakyat kepada para pejabat publik, baik melalui pemilihan maupun penunjukkan, untuk menyelenggarakan roda pemerintahan demokratis justru disalahgunakan untuk memenuhi interese pribadi dan kelompok. Sebaliknya, rakyat sebagai sentrum utama demokrasi malah disubordinasi. Konsekuensinya, kedaulatan rakyat diingkari, distribusi kesejahteraan tidak merata, apatisme politik semakin menguat, dan terutama kepercayaan rakyat terhadap para pejabat publik dan sistem demokrasi itu sendiri menurun.

Sebagaimana Hannah Arendt dalam refleksinya terhadap sosok Adolf Eichmann, penulis melihat bahwa akar persoalannya terletak pada ketidakmampuan berpikir dan berimajinasi para pejabat publik ketika dihadapkan pada sistem yang korup atau perintah atasan untuk bertindak korup, baik dalam bentuk korupsi uang rakyat, suap-menyuap, nepotisme, dan lain sebagainya. Ada indikasi bahwa mereka mengikuti secara buta sistem yang ada (sikap konformis). Selain itu, mereka dengan gampang diperintah dan diinstrumentalisasi oleh atasan (*worldlessness*) untuk bertindak korup, tanpa ada satu upaya penilaian kritis.

Oleh karena itu, sebagai langkah solutif, sebagaimana Hannah Arendt, penulis memproposalkan pentingnya mereaktifkan aktivitas berpikir, baik berpikir sebagai dialog dengan diri sendiri, berpikir representatif, dan juga berpikir sebagai upaya melawan konformitas. Mereaktifkan aktivitas berpikir menjadi sebuah kemendesakkan agar para pejabat publik tidak terjebak di dalam sistem yang korup serta tidak mudah dimobilisasi dan diinstrumentalisasi oleh atasan untuk menjadi penjajah demokrasi lewat aktus korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Kemunduran Demokrasi, Banalitas Kejahatan, dan Aktivitas Berpikir.

ABSTRACT

Kaprisius Edwin Selai, 20.75.6844. **Corruption Practices and the Degradation of Democracy Quality in Indonesia (Analysis from the Perspective of Hannah Arendt's Banality of Evil)**. Thesis. Undergraduate Programme, Philosophy Study Programme, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2024.

This thesis aims to (1) examine the relationship between corruption practices of public officials and the degradation of democracy quality in Indonesia, (2) interpret corruption practices and the degradation of democracy quality in Indonesia in light of Hannah Arendt's concept of the banality of evil, (3) propose thinking activities as a way to eradicate corruption and restore the dignity of democracy in Indonesia.

In the process of writing this thesis, the author used a qualitative descriptive method. This means that the author read and reflected on various literature related to the discussed topic, whether in the form of books, journals, newspapers, or electronic sources. Reading and reflecting on various literature helped the author dissect the problems of corruption of public officials and the degradation of democracy quality in Indonesia according to Hannah Arendt's concept of the banality of evil.

In essence, this thesis discusses the fact of corruption among public officials in Indonesia, which has implications for the degradation of democracy quality (read: Pancasila Democracy). The mandate entrusted by the people to public officials, whether through elections or appointments, to administer democratic governance is actually abused to fulfill personal and group interests. Conversely, the people as the main center of democracy are subordinated. As a consequence, popular sovereignty is denied, the distribution of welfare is uneven, political apathy is strengthened, and especially the people's trust in public officials and the democratic system itself decreases.

As Hannah Arendt reflected on the figure of Adolf Eichmann, the author sees that the root of the problem lies in the inability of public officials to think and imagine when faced with a corrupt system or orders from superiors to act corruptly, whether in the form of embezzlement of public funds, bribery, nepotism, and so forth. There is an indication that they blindly follow the existing system (conformist attitude). Moreover, they are easily commanded and instrumentalized by superiors (worldlessness) to act corruptly, without any effort of critical judgment.

Therefore, as a solution step, like Hannah Arendt, the author proposes the importance of reactivating thinking activities, whether thinking as a dialogue with oneself, representative thinking, and also thinking as an effort against conformity. Reactivating thinking activities becomes an urgency so that public officials are not trapped in a corrupt system and are not easily mobilized and instrumentalized by superiors to become democracy criminals through corrupt acts.

Keywords: Corruption, Democracy Backsliding, Banality of Evil, and Thinking Activities.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Metode Penulisan	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PRAKTIK KORUPSI DAN DEGRADASI KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA	10
2.1 Hakikat Korupsi	11
2.1.1 Pengertian Korupsi.....	11
2.1.2 Ciri-ciri Korupsi	12
2.1.3 Bentuk-Bentuk Korupsi	13
2.2 Potret Korupsi di Indonesia.....	15
2.2.1 Era Orde Lama	17
2.2.2 Era Orde Baru	18
2.3.2 Era Reformasi	21
2.3 Faktor-Faktor Penyebab Lahir dan Suburnya Perkara Korupsi	23
2.4 Hakikat Demokrasi	28
2.4.1 Pengertian Demokrasi	28
2.4.2 Indikator Demokrasi	28
2.4.3 Keunggulan Demokrasi.....	29
2.5 Demokrasi di Indonesia	30
2.5.1 Demokrasi Pancasila: Demokrasi Khas Indonesia.....	31
2.5.1.1 Pengertian Demokrasi Pancasila	31

2.5.1.2 Ciri-ciri Demokrasi Pancasila	32
2.5.1.3 Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila	33
2.5.1.4 Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila	33
2.5.1.5 Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi Pancasila	34
2.5.2 Dinamika Perkembangan Demokrasi di Indonesia	36
2.5.2.1 Masa Republik Indonesia I (1945-1959): Masa Demokrasi Konstitusional	36
2.5.2.2 Masa Republik Indonesia II (1959–1965): Masa Demokrasi Terpimpin .	37
2.5.2.3 Masa Republik Indonesia III (1965–1998): Masa Demokrasi Pancasila .	38
2.5.2.4 Masa Republik Indonesia IV (1998-Sekarang): Masa Reformasi	39
2.6 Korupsi dan Degradasi Kualitas Demokrasi di Indonesia	40
2.6.1 Korupsi Menegasikan Kedaulatan Rakyat	42
2.6.2 Korupsi Menurunkan Kepercayaan Publik	44
2.6.3 Korupsi Melahirkan Apatisme Politik	45
2.6.4 Korupsi Mengabaikan Kesejahteraan Umum	47
2.6.5 Korupsi Menodai Sakralitas Hukum	50
BAB III BANALITAS KEJAHATAN HANNAH ARENDT, PRAKTIK KORUPSI, DAN DEGRADASI KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA	53
3.1 Biografi Singkat Hannah Arendt.....	54
3.2 Konsep Banalitas Kejahatan	56
3.2.1 Pengadilan Eichmann di Yerusalem	56
3.2.1.1 Biografi Singkat Adolf Eichmann.....	56
3.2.1.2 Gambaran Singkat Pengadilan Adolf Eichmann.....	57
3.2.2 Pengertian Banalitas Kejahatan.....	61
3.3 Banalitas Kejahatan dan <i>Worldlessness</i>	64
3.3 Banalitas Kejahatan Korupsi di Indonesia	66
3.4 Banalitas Kejahatan dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia.....	70
3.5 Mereaktifkan Kemampuan Berpikir: Upaya Membasmi Korupsi dan Memulihkan Marwah Demokrasi Pancasila	73
3.5.1 Berdialog dengan Diri Sendiri	75
3.5.2 Berpikir Representatif	77
3.5.3 Berpikir: Melawan Konformitas	80

BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Catatan Kritis	86
4.3 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89